

## Bab 1

### PENDAHULUAN

#### **Latar Belakang Masalah**

Keberlangsungan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia diatur dan dikelola dua kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kemenag. Pendidik yang dimaksud adalah guru dan kepala sekolah, sementara tenaga kependidikan di dalamnya ada petugas administrasi dan pengawas pendidikan. Salah satu peran penting dari personal tadi adalah pengawas pendidikan. Karena pengawas pendidikan ini adalah personalia pendidikan yang *independent*, ia hanya sebagai tenaga fungsional dengan tugas utama membina guru dan kepala sekolah, serta tenaga administrasi.

Keberadaan pengawas dapat ditelusuri dari PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru Pasal 54 Ayat 8 menyatakan pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Peraturan tersebut sinergis dengan PMA No. 2 tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam lingkungan Kemenag ada dua pengawas yaitu, pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah. Pengawas madrasah sesuai dengan pengawas satuan pendidikan dan pengawas PAI adalah pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran di sekolah. Meskipun demikian, di lingkungan Kemenag setelah diterbitkannya PMA No. 2 tahun 2012 pada bulan Februari 2012 untuk memisahkan dua jabatan tersebut pada satu pengawas. Posisi pengawas PAI dan madrasah di Indonesia masa ini tetap masih melekat jabatannya pada satu orang pengawas.

PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP dikenal istilah pengawas dan penilik, Pasal 39 Ayat 1 pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dan Pasal 40 Ayat 1 pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan. Sementara dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas* Dirjen PMPTK Diknas tahun 2009 menjelaskan ada 4 pengawas, sebagaimana di atas, yakni pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling, dan pengawas sekolah luar biasa. Sementara dalam Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 01/III/PB 2011, No. 6 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Pasal 6 menjelaskan bidang pengawasan meliputi pengawasan TK/RA, SD/MI, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

Sehubungan dengan pembagian pengawas tersebut, kajian penulis tentang pengawas PAI tidak terlepas dari persyaratan pengawas, ia memiliki standar kualifikasi, kompetensi, untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan wewenangnya. Dari sudut pandang kompetensi misalnya, pengawas memiliki kompetensi akademik dan manajerial yang memadai, bahkan melebihi kemampuan para guru dan kepala sekolah/madrasah. Hal ini sangat mendukung berjalannya tugas pokok dan fungsi dari pengawas tersebut, kegiatan pengawas akademik misalnya dalam penyusunan program, pelaksanaan program, dan pelaporan hasil pelaksanaan program pengawasan ( Nur Abadi 2010 hlm. 19-22 ).

Dalam kegiatan ini akan tampak bagaimana pengawas melakukan aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan oleh pengawas dalam pengawasannya, sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan tugas pengawasannya dengan baik. Dengan begitu, pengawas mampu memosisikan sebagai konsultan, *partner*, atau penilai dari *stakeholder*-nya (guru/kepala sekolah) (An-Nahidl 2010 hlm. 422-423). Harapan

tersebut tidak terkecuali pengawas PAI, semestinya mampu memposisikan apa yang diidealkan.

Berbeda persoalannya, pada tahun 2007 Puslitbang pendidikan agama dan keagamaan Kemenag Jakarta meneliti tentang kinerja pengawas PAI menyatakan bahwa dalam penyusunan program pengawasan sekolah, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan analisis terhadap hasil belajar siswa, sumber daya pendidikan, dan pengembangan profesi belum menunjukkan hasil yang maksimal (Habibullah 2008 hlm. 117). Lalu, penelitian Rusdiana Husaini dkk (2013) tentang kinerja pengawas PAI pada sekolah sekota Banjarmasin tahun 2012 menyatakan juga belum optimal, kinerja perencanaan kepengawasan, seperti program tahunan, program semester, dan kinerja pengawas dalam pelaksanaan kepengawasan akademik, para pengawas selalu melakukan observasi kelas mengamati proses pembelajaran mengajar guru. Sebagian pengawas juga menyampaikan *feedback*, untuk meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran. Pengawas juga memberikan bimbingan kepada guru dalam hal penyusunan silabus dan RPP, namun belum intensif karena tidak dijadwalkan secara khusus ( Syaiful Sagala 2011 hlm, 38 ).

Sebagian besar pengawas juga memberikan bimbingan penggunaan metode dan strategi pembelajaran variatif, tetapi sebagian besar pengawas tidak dapat memberikan bimbingan penggunaan media/teknologi informasi dalam pembelajaran, sebab pengawas tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai pemanfaatan teknologi informasi. Dan terakhir, kinerja membuat laporan hasil pengawasan, semua pengawas belum membuat laporan bulanan dan laporan tahunan, mereka beralasan tidak ada waktu untuk membuatnya.

Bersamaan dengan beberapa fenomena di atas, berdasarkan data awal melalui observasi dengan beberapa guru pendidikan agama Islam dan kepala sekolah, tentang kinerja pengawas PAI pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang,

guru-guru PAI mengeluhkan tentang pembinaan dan pembimbingan dari pengawas PAI. Hal ini dikarenakan bimbingan dan pembinaan dari pengawas PAI tidak sesuai dengan harapan, informasi yang disampaikan kurang aktual, materi pembinaan hanya berkenaan dengan administrasi guru saja dan jarang melakukan kunjungan kelas.

Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1984 hlm, 62) mengindikasikan ada tiga hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, di antaranya *pertama*, faktor organisasi pengawas karena kurangnya pengenalan dan kesadaran tentang tanggungjawab pengawas serta kegagalan dalam menetapkan wewenang dan tanggungjawab pengawas. *Kedua*, di pihak pengawas, yang kurang dipersiapkan menjadi pengawas, pengalaman belajar yang pernah diperoleh di saat “*pre-service education*” belum menjadi bekal yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengawas daripada kepala sekolah dan pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya, akan menghambat pelaksanaan pengawasan pendidikan. Serta, *ketiga* dari sikap guru-guru terhadap pengawas merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan. Kesan guru terhadap pengawas yang kurang demokratis pernah terjadi di masa lalu. Karena prosedur pengawasan yang kurang memenuhi harapannya.

Problematika klasik hubungan antara organisasi pengawas, pengawas sendiri, dan guru ini akan selalu ada, bila tidak dibenahi serta diantisipasi sebelumnya. Pandangan guru yang menyatakan bahwa pola pengawasan yang dianut saat ini masih kurang memuaskan, karena masih ada pengawas yang kurang memahami tugasnya, dan kurang menguasai materi. Tidak berbeda dengan pandangan guru, kepala sekolah juga menyatakan bahwa pola pengawasan saat ini juga kurang memuaskan (Makawimbang 2011 hlm, 38). Hal ini menuntut suatu pola pengelolaan kinerja pengawas pendidikan. Sebagaimana penulis mengutip pendapat dari Litjan Poltak Sinambela (2012 hlm, 22-23) menggambarkan permasalahan tersebut di atas, ini dianggap dengan “pengelolaan kinerja” bagi suatu yang mau tidak mau dilakukan. Mereka melakukan hanya karena

“sudah seharusnya dilakukan” atau “terpaksa dilakukan.” Dalam hal ini perlu disadari bahwa jika pengelolaan kinerja dilakukan dengan benar, maka akan memiliki potensi memecahkan sebagian besar masalah kinerja pengawas PAI yang mereka hadapi.

Berdasarkan pembacaan di atas, muara dari persoalan tersebut perbandingan kompetensi pengawas PAI tidak berbanding dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban pengawas PAI. Di sinilah kajian kinerja pengawas dituntut untuk selalu diperbaiki dari tahun ke tahun. Dengan mengkaji kinerja pengawas PAI pada kurun waktu tertentu akan mengetahui tingkat keberhasilan seorang pengawas secara keseluruhan selama periode itu, di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dengan demikian, persoalan tidak berhasilnya harapan dari tercapainya tujuan pengawasan PAI ini sebagai *feedback* terhadap solusi ke depan.

Persoalan bagaimana kinerja pengawas PAI itu berjalan dengan efektif dan efisien. Sudarmanto (2009 hlm, 8-9) menjelaskan ada dua garis besar berkaitan dengan kinerja yaitu: (1) kinerja yang merujuk pengertian pada hasil, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Pada penelitian tentang pengawas PAI di atas pada tahun 2007 dan 2012 menunjukkan dalam pandangan efektifitas kinerja pengawas belum menunjukkan hasil yang maksimal, dan (2) kinerja merujuk pengertian pada perilaku, kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat orang bekerja. Kinerja ini sinonim dengan perilaku, yang berarti sesuatu secara aktual dapat dikerjakan dan diobservasi. Dalam makna ini kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Hal ini sebagaimana perilaku secara aktual yang telah

dikerjakan pengawas PAI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga belum menunjukkan ekuivalansi.

Dalam Permen PAN dan RB No. 21 tahun 2010 tersebut terdapat penilaian kinerja pengawas, penyelarasannya ditegaskan dalam PMA No. 2 tahun 2012 Pasal 15 bahwa jenjang, jabatan dan angka kreditnya berpedoman pada ketentuan Permen PAN dan RB No. 21 tahun 2010 pada bab V Pasal 12 menjelaskan unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya adalah pendidikan pengawas, pengawasan akademik dan manajerial, pengembangan profesi, dan penunjang tugas pengawas yang lain seperti keanggotaan dalam organisasi profesi dan lainnya. Meskipun demikian, pengawas PAI sebagai pengawas dalam ruang lingkup akademik di sekolah ( Dirjen PMPTK Depdiknas 2008 hlm, 3 ), berarti secara pelaksanaan membatasi dirinya pada ranah pengawas mata pelajaran. Hal ini lebih spesifik dalam penilaiannya pengawas PAI menitikberatkan pada pengawasan akademik yang terdiri dari penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, dan pelaporan program pengawasan ( PMA No.2 tahun 2012).

Ruang lingkup pengawas ada dua pengawas manajerial dan pengawas akademik, pengawas manajerial adalah terkait dengan tugas pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah. Sedangkan pengawas akademik adalah terkait dengan tugas pembinaan guru dalam meningkatkan proses pembelajaran (Dirjen PMPTK Depdiknas 2008 hlm, 3)

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasannya PMA No. 2 Tahun 2012 bahwa pengawas PAI adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan PAI pada sekolah. Pengawas PAI ini sekretariatnya kadang ada yang di kantor UPTD Kemendikbud Kecamatan/ Kabupaten/Kota, dan ada yang berkantor di Kemenag Kabupaten/Kota ( Pokjawas PAI 2008 hlm, 22 ).

Pada era otonomi desentralisasi pendidikan saat ini, pengawas PAI yang kantornya dan tempat wilayah kerjanya berada di Kota Palembang sebagai ibu Kota provinsi Sumatera Selatan cukup strategis, secara geografis letaknya sebagai daerah ibu Kota provinsi sangat berpengaruh terhadap beberapa pemerintahan daerah Kabupaten atau Kota di Sumatera Selatan. Arus kebijakan secara struktural pemerintahan dari dinas Kemendikbud daerah dan Kemenag daerah menguntungkan pengawas PAI yang ada di daerah provinsi akan lebih dahulu menyebar daripada daerah kabupaten/Kota yang jauh di luar daerah provinsi. Secara *socio-cultur* sebagai *agent transfer of change* masyarakat, pola kehidupan beragama masyarakat pun akan mempengaruhi proses pembelajaran PAI di sekolah yang berada di sekitar Kota tersebut. Sebagaimana dari usaha pembelajaran PAI di sekolah diharapkan membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial.

Tujuan kepengawasan akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya (Glickman, 1981). Maka melalui kepengawasan akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkat (Neagley, 1980).

Berdasarkan hasil studi awal ditemukan bahwa tujuan kepengawasan akademik yang dilakukan pengawas PAI pada SMP di kecamatan Kertapati kota Palembang masih belum tercapai. Hal itu dilihat dari kinerja mengajar guru PAI sebagai tolok ukur keberhasilan kerja pengawas PAI, kenyataan menunjukkan bahwa kinerja sebagian besar guru PAI yang dibina masih memprihatinkan, hal ini terlihat dari iklim, suasana, dan proses pembelajaran dalam kelas yang tidak dinamik, kreatif dan masih bersifat *teacher centered*. Situasi pembelajaran cenderung masih didominasi oleh perilaku mengajar guru yang verbalis akibat dominannya penggunaan metode “ceramah”, yang mengakibatkan situasi pembelajaran bersifat monoton, tanpa adanya variabilitas baik

dalam sumber/bahan pengajaran, metode mengajar, maupun strategi pembelajaran pada umumnya.

Padahal aset yang paling berharga yang harus diwariskan kepada generasi penerus bangsa adalah pendidikan yang berkualitas, sehingga kita tidak mewariskan kepada bangsa ini keturunan-keturunan yang lemah, sebagaimana firman Allah SWT :

وَيَذَرُونَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ  
بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِيُذَكِّرُوا الَّذِينَ نَسُوا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(Q.S An-nisa :9).

Signifikansi kinerja pengawas PAI dalam melakukan kegiatannya sangat dibutuhkan oleh guru Pendidikan Agama Islam di sekolah. Sehingga penelitian ini membahas kinerja pengawas PAI pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang, yaitu di SMP Negeri 12, SMP Negeri 25, dan SMP Negeri 36.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam dibidang pengawasan akademik pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam dibidang pengawasan akademik pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang dibidang pengawasan akademik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dibidang pengawasan akademik pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

### **Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan dibidang kepengawasan (supervisi), dan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Kementerian Agama, agar dapat lebih mengoptimalkan kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam yang ditugaskan pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam, agar mampu meningkatkan kinerjanya secara profesional, kreatif, dan inovatif.
3. Kepala Sekolah, agar dapat meningkatkan kerja sama dengan pengawas Pendidikan Agama Islam secara maksimal.
4. Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan profesionalismenya.
5. Penulis, untuk menjadi acuan berfikir dalam mendalami ilmu pendidikan di bidang kepengawasan (supervisi).

### **Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang kinerja telah cukup banyak dilakukan. Penelitian deskriptif kuantitatif tentang kinerja pengawas juga telah pernah dilakukan oleh FX. Rahmad Rudi Hartono (2002) dengan judul “ Studi Kinerja Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat”. Hasilnya menunjukkan bahwa 55% tingkat kinerja pengawas di bawah rata-rata.

Penelitian tentang evaluasi kinerja pengawas pendidikan agama Islam juga dilakukan oleh Hj.Ely Manizar (2006) dengan judul “ Evaluasi Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Palembang”. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa selama ini sebagian besar pengawas PAI belum menunjukkan kinerja yang maksimal hanya mencapai 70,94%.

Penelitian Sri Martini (2008) yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan Kerja Pengawas Pendidikan agama Islam di Kabupaten Ogan Ilir” Penelitian ini membahas dua hal pokok yaitu bagaimana mutu pelaksanaan kerja pengawas Pendidikan Agama Islam di Ogan Ilir dan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kerja pengawas Pendidikan Agama di Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan kerja pengawas PAI belum menunjukkan pelaksanaan kerja yang baik, hanya 29,41% yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada responden, lokasi, waktu dan metodologi penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada kinerja pengawas pendidikan agama Islam dibidang pengawasan akademik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan menggunakan pendekatan evaluasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, penelitian serupa belum pernah dilakukan sebelumnya.

### **Definisi Konseptual**

### *Kinerja*

Kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* (bahasa Inggris) yang berasal dari kata *to perform*. Kata ini mempunyai beberapa makna, antara lain : (1) melakukan atau menjalankan; (2) memenuhi atau menjalankan suatu nazar; (3) menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan; (4) menggambarkannya dengan suara atau alat musik; (5) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab; (6) melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan; (7) memainkan (pertunjukan) musik; dan (8) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (Prawirosentono 1999, hlm.1-2).

Menurut August W.Smith, yang dikutip oleh Sedarmayanti (1995 hlm 50) mengartikan kinerja sebagai : “*output drive processes, human or otherwise*”. Maksudnya, kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Menurut Smither (1996 hlm 393) “*Performance is not necessarily the bottom in the executive appraisal process*”.

Sedangkan dalam penelitian ini, membahas kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang, yang mencakup kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam dalam kepengawasan akademik mencakup dalam kegiatan; (1) menyusun program pengawasan; (2) melaksanakan program pengawasan; (3) evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru PAI.

### *Pengawas Pendidikan Agama Islam*

Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas yang tugas pokok dan fungsinya serta tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan Pendidikan Agama Islam

pada jenjang sekolah SMP/SMA, di samping ia mengawasi satuan pendidikan madrasah. Jadi penulis hanya membahas pengawas dari sisi bagian pengawasan PAI-nya saja.

#### *SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang*

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang adalah tiga buah SMP Negeri yang ada di Kecamatan Kertapati Kota Palembang yaitu; SMP Negeri 12 Palembang, SMP Negeri 25 Palembang dan SMP Negeri 36 Palembang.

### **Kerangka Teori**

Teori yang menjadi acuan untuk mengetahui kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana diungkapkan Sudjana (2006), kinerja pengawas satuan pendidikan yang profesional tampak dari unjuk kerjanya sebagai pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menampilkan prestasi kerja atau *performance* hasil kerja yang baik, serta berdampak pada peningkatan prestasi dan mutu sekolah binaannya. Kinerja pengawas satuan pendidikan juga tampak dampaknya bagaimana guru menerapkan PAKEM (Pembelajaran siswa yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan), bagaimana pemahaman guru tentang implikasi dari implementasi MBS, penilaian portofolio dalam penilaian (Masjudi, 2002)

Lingkup tugas kepengawasan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah hanya terkait dengan tugas kepengawasan akademik (Kemenag RI 2012, hlm 16). Kepengawasan akademik tersebut mencakup dalam kegiatan; (1) menyusun program pengawasan; (2) melaksanakan program pengawasan; (3) evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru PAI.

#### *Kinerja*

## 1. Pengertian Kinerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja” (Depdikbud 1998, hlm.503). Sedangkan kinerja dalam kamus manajemen (Sugian,2006:166) didefinisikan pencapaian oleh individu, tim, organisasi atau proses. Prawirosentono (1992 :2) mengartikan *performance* atau kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan pada jangka waktu atau periode tertentu berdasarkan norma atau ukuran yang berlaku untuk pekerjaan itu. Dengan demikian, penilaian kinerja berdasarkan konsep ini didasarkan pada rincian tugas yang harus dilakukan dalam pekerjaan tersebut.

Lingkup tugas kepengawasan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah hanya terkait dengan tugas kepengawasan akademik (Kemenag RI 2012, hlm 16). Kepengawasan akademik tersebut mencakup dalam kegiatan; (1) menyusun program pengawasan; (2) melaksanakan program pengawasan; (3) evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru PAI. Konsep kinerja inilah yang digunakan dalam penelitian ini.

## 2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah proses menentukan kinerja seseorang dengan menggunakan kriteria tertentu melalui pengumpulan informasi mengenai pelaksanaan tugas-tugas dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang telah didefinisikan, baik proses maupun hasil kerja (Depdiknas Dirjen PMPTK Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009: 6).

Selanjutnya aspek-aspek penting yang berkaitan dengan penilaian kinerja adalah indikator kinerja, orientasi waktu metode penilaian kinerja, fokus penilaian kinerja, masalah-masalah dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja.

### 1) Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja. Manfaat dari ukuran kinerja ini berguna bagi banyak pihak. Sudarmanto (2009: 11-19) mengutip dari John Miner mengenai indikator kinerja adalah ada 4 dimensi yang menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja: (a) kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan, (b) kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan, (c) penggunaan waktu dalam kerja, ialah tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja hilang, dan (d) kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.

### 2) Orientasi Waktu Metode Penilaian Kinerja

Triton (2009: 91-92) membagi ada dua metode penilaian kinerja menurut orientasi waktunya yaitu: (1) metode penilaian berorientasi masa lalu, antara lain: (a) *rating scale*, (b) *checklist*, (c) peristiwa kritis, (d) tes dan observasi prestasi kerja, (e) evaluasi kelompok, dan (2) Metode penilaian berorientasi masa depan, antara lain: (a) penilaian diri (*self appraisal*), (b) penilaian psikologis (*psychological appraisal*), (c) pendekatan *management by objective* (MBO).

### 3) Fokus Penilaian Kinerja

Penilaian semestinya berfokus menerjemahkan tanggungjawab pekerjaan dalam aktivitas sehari-hari karyawan. Tanggungjawab pekerjaan ditentukan atas dasar suatu analisis pekerjaan yang menyeluruh. Penilaian ini juga memusatkan perhatian pada kinerja pekerjaan, bukan individu. Pentingnya fokus penilaian kinerja ini tidak hanya pada kinerja pekerjaan, akan tetapi ada pertimbangan 3 aspek relevansinya dalam

kontek penilaian kinerja, yaitu: (1) defisiensi, (2) kontaminasi, dan (3) distorsi (Ivancevich, 2006: 217).

#### 4) Masalah-masalah dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja

Agus Darma (2004: 372-374) menjelaskan ada 9 hal yang perlu diperhatikan dalam permasalahan penilaian kinerja, yaitu: (1) *hallo effect* (bias sistemik dalam penilaian sesuatu), (2) kecenderungan menilai rata-rata, (3) kekakuan-kemurahan hati, (4) peristiwa akhir-akhir ini, (5) akibat penilaian sebelumnya, (6) pertemanan, (7) akibat perbandingan, (8) kesan pertama, dan (9) sama dengan saya. Dengan demikian Agus Darma menambahkan 3 pendapat dari gagasannya Marwansyah, yaitu: kesan pertama, akibat perbandingan, dan akibat penilaian sebelumnya. Namun begitu, gagasan Marwansyah tentang kurangnya obyektivitas ini sebenarnya mencakup apa yang telah diungkapkan Agus Darma dalam pendapatnya tersebut. Agar penilaian kinerja mendapatkan hasil tetap objektif, maka hindari delapan hal berikut ini, yaitu: kekurangan standar, standar yang tidak relevan atau subjektif, standar yang tidak realistis, ukuran yang jelek terhadap karyawan, kesalahan menilai, umpan balik yang jelek terhadap karyawan, komunikasi yang negatif, dan kegagalan untuk menerapkan data evaluasi (Sulthon, 2010: 26).

#### 5). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Gibson yang dikutip oleh Ilyas (2001), secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kerja dan kinerja, yaitu: variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel tersebut mempengaruhi kelompok kerja yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja personel. Perilaku yang berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu jabatan atau tugas.

Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan, penilaian dan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah. Dalam Surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996, Bab I Pasal 1 angka (1) tentang pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah (Departemen Agama RI 2003, hlm.5).

Mengacu pada SK Menpan tersebut, maka pengawas sekolah di lingkungan Departemen Agama, bahwa pengawas pendidikan Agama Islam pengertiannya menjadi lebih spesifik sebagai berikut : Pengawas pendidikan agama Islam adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggara pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Departemen Agama RI, 2000, hlm. 16).

Dengan demikian tergambar dengan jelas fungsi pokok pengawas sekolah termasuk pengawas pendidikan agama Islam sama dengan supervisi pendidikan. Supervisi merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendiskripsikan berbagai macam perilaku manusia dalam konteks sistem sekolah. Penelitian yang signifikan mengenai supervisi guru masih jarang dilakukan dan teorinya pun masih belum begitu berkembang, bahkan peran para supervisor dalam organisasi sekolah masih lemah rasio antara jumlah guru dengan jumlah supervisor juga belum profesional (Mitzel 1969, hlm. 1829). Sebelum supervisi dibahas lebih rinci, terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah

dari supervisi itu sendiri. Supervisi berasal dari kata Inggris *supervision* yang terdiri dari dua kata, yaitu *super* dan *vision*, yang mengandung pengertian melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor (Departemen Agama RI 2003, hlm. 8).

Ben Harris, seperti yang dikutip oleh Sergiovani mendefinisikan supervisi pendidikan sebagai berikut :

*What school personel do with and things to maintain or change the school operation in ways that directly influence the teaching processes employed to pupil learning supervision is highly instuction related but not highly pupil related supervision is a major funtion of the school operatian, not a task of a specific job or a set of techniques. Supervision is directed toward both maintaining and improving the teaching learning process of the school (Sargeovoni 1983, hlm. 7).*

Dari definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa supervisi itu bertujuan untuk memelihara atau mengadakan dalam pelaksanaan sekolah. Dalam hal ini, menggunakan cara untuk mempengaruhi guru – guru secara langsung guna memajukan kegiatan belajar siswa. Pelaksanaan supervisi mempunyai tujuan yang erat dengan pengajaran, berhubungan langsung dengan guru akan tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan siswa. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mempelancar proses belajar dan mengajar khususnya dan proses pendidikan pada umumnya. Atau dengan kata lain bahwa tujuan supervisi adalah mencapai hasil proses belajar mengajar yang lebih tinggi dengan cara membina dan mengembangkan kemampuan mengajar guru – guru.

Disamping itu Good Carter memberikan pengertian supervisi pendidikan pengajaran dalam “Dictionary of Education” yang diterjemahkan oleh Pief A. Sahertian dan Frans Mataheru mengemukakan bahwa: “Supervisi adalah usaha dari petugas – petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam

memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode pengajaran serta evaluasi pengajaran” (Sahertian 1981, hlm. 18).

Berdasarkan rumusan diatas, jelaslah bahwa sasaran supervisi pendidikan adalah memperbaiki kinerja guru agar selalu berkembang dalam jabatannya dan mengembangkan kemampuan guru serta mengadakan perincian tentang tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Hal ini adalah penting sekali dan harus diperhatikan oleh seorang supervisor dalam membina serta mengembangkan kemampuan mengajar guru.

Lebih lanjut Bodman mengumumkan definisi supervisi pendidikan yang juga diterjemahkan oleh Piet A. Sahertian dan Frans Mataheru mengatakan bahwa Supervisi adalah suatu usaha menstimulis, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individu maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran, dengan demikian mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontiyu sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern (Sahertian 1983, hlm. 19).

Sehubungan dengan rumusan itu, maka supervisi pengajaran adalah suatu proses pelayanan, pembimbingan dan pembina kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran terhadap guru-guru dan personalia sekolah lainnya yang berhubungan langsung dengan proses belajar dan mengajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar dan mengajar, agar para siswa dapat belajar secara efektif dan efesien. Rumusan ini senada dengan ungkapan Mosher dan Purpel bahwa tugas supervisi pengajaran (instructional supervision) seharusnya adalah memberikan masukan kepada guru tentang bagaimana cara mengajar yang baik, kepemimpinan yang professional dalam rangka mereformulasi

pendidikan, misalnya yang berkenaan dengan masalah kurikulum. Mosher dan Purpel juga mengatakan bahwa supervisi guru (teacher supervision) seharusnya meliputi seluruh upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran, menstimulasi usaha peningkatan profesionalitas guru, menyeleksi dan merevisi tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pengajaran dan evaluasi pengajaran (Mosher 1996, hlm. 1825).

Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Oleh karena itu aktivitas pelayanan, pembimbingan dan pembinaan kepada guru-guru mengacu kepada usaha yang bersifat manusiawi dan tidak bersifat otoriter. William H. Lucio dan John D. MC Neil mengemukakan pengertian dari supervisor sebagai berikut :

*A Supervisor is a professionally trained person assigned to the office of superintendent of school. The rank is lower than of assistant superintendent and also below that of director. The position calls for almost exclusively instructional leadership (supervision). There so many areas of service for which supervisors are responsible that the title is hardly descriptive. Supervisors may contribute to any are of the school program or to any service required to keep the school running. (John D.Mc Neil 1979, hlm. 23).*

Seorang supervisor adalah seorang profesional yang sudah terlatih, sedangkan eselonnya di bawah asisten super intendent dan direktur. Ia juga disebut dengan kepemimpinan pengajaran, ia memberikan kontribusi dalam perbaikan program sekolah, agar program sekolah dapat berjalan dengan lancar. Di Indonesia, yang disebut dengan supervisor pengajaran adalah kepala sekolah, penilik untuk tingkat pendidikan dasar, dan pengawas untuk tingkat pendidikan menengah, dan sebetulnya untuk perguruan tinggi seorang inspektur dapat juga disebut supervisor level atas. Semuanya disebut dengan supervisor umum, sedangkan supervisor khusus adalah koordinator bidang studi atau guru senior yang diberi delegasi wewenang oleh kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran yang bersifat khusus.

Beberapa pengertian supervisi pendidikan yang telah dikemukakan di atas adalah bentuk bantuan, bimbingan dan layanan yang diberikan oleh supervisi kepada guru – guru secara umum. Dan berikut ini penulis kemukakan pengertian secara khusus yaitu pengertian supervisi atau pengawasan pendidikan agama Islam. Pada dasarnya fungsi supervisi pendidikan agama Islam di sekolah umum ialah bantuan yang diberikan secara khusus kepada guru-guru pendidikan agama Islam untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dan sempurna.

Karena pengawas sekolah mempunyai fungsi yang sama dengan supervisi pendidikan, maka dengan demikian yang dimaksud dengan supervisor/pengawas pendidikan agama Islam pada SMP adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu guna memberikan bantuan yang berupa bimbingan dan binaan kepada guru pendidikan agama Islam pada SMP sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan agama Islam yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Secara garis besar kerangka teori dari penelitian ini dapat dilihat dari skema bagan di bawah ini:

## **Metodologi Penelitian**

### *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Moleong (2002 hlm, 6), metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan menggunakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata,

gambar, dan angka-angka. Semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Peneliti menganalisis dalam bentuk aslinya, hal ini tampak seperti orang merajut, sehingga setiap bagian yang ditelaah satu demi satu. Pertanyaan “mengapa”, “alasan apa”, dan “bagaimana terjadinya” akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu memang sudah demikian keadaannya.

Sementara menurut Sukardi ( 2003 hlm, 157), mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan karena tujuan penelitian melukiskan variabel atau kondisi “apa yang ada” dalam suatu situasi.

#### *Subjek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah pengawas Pendidikan Agama Islam yang membina SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang berjumlah 1 orang, yang juga berfungsi sebagai *key informan* dalam penelitian ini.

#### *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), alasan penulis menggunakan jenis lapangan dikarenakan penelitian ini meneliti tentang kinerja pengawas pendidikan agama Islam di SMPN 12, SMPN 25 dan SMPN 36 Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

### *Jenis dan Sumber data*

#### *Jenis data*

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Dalam bidang pendidikan analisis kegiatan dilaksanakan terhadap tugas-tugas dan pekerjaan pengawas Pendidikan Agama Islam SMP yang difokuskan pada menganalisis kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang pada pengawasan dibidang akademik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

#### *Sumber Data*

Menurut Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan mengenai kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang mencakup pengawasan akademik serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam. Data tersebut bersumber dari pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang yang berjumlah 1 orang, kemudian 3 orang kepala sekolah dan 10 orang guru pendidikan agama Islam.
- 2) Data Sekunder, yaitu sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari beberapa dokumen tentang profil pengawas PAI di Kota Palembang, dokumen pengawas dan sebagainya, serta wawancara Kasi Pendidikan Madrasah/Kasi PAI yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer

sehingga kedua sumber data tersebut saling melengkapi dan memperkuat analisis permasalahan.

### *Teknik Pengumpulan Data*

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Metode observasi ini merupakan satu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki (Arikunto 1990, hlm.133). Metode ini dilakukan karena secara kualitatif penulis akan mendapatkan gambaran dari pengamatan secara langsung tentang kinerja pengawas PAI pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam pengawasan akademik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Wawancara

pada saat wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, peneliti akan menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan akademik, pelaksanaan program pengawasan klinis dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam. Kemudian, dengan mendapatkan pokok-pokok jawaban tersebut, peneliti akan memperdalam pertanyaan dari 3 komponen tersebut lebih detail dengan masing-masing *item*-nya.

3. Dokumentasi

metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang bagaimana kinerja pengawas selama tahun 2013, baik berupa data foto, tulisan atau dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan program pengawasan Pendidikan Agama Islam dibidang akademik. 3.

#### 4. Check List

Metode check list dalam penelitian ini berupa instrumen pengumpulan data dengan daftar cocok dan hasil analisa dari dokumen yang dilihat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi nara sumber untuk mendapatkan data yang valid.

Setelah ketiga metode pengumpulan data tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti kemudian akan mengorganisasi, mereduksi data dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis.

#### *Teknik Analisis Data*

Menurut Milles dan Huberman (1992: 16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, aktivitasnya dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan

##### 1. Reduksi data

Data yang didapat ditelaah kembali untuk memilih data yang diperlukan bagi kepentingan penelitian yakni kinerja pengawas PAI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta membuang data yang tidak ada relevansinya dengan penelitian.

##### 2. Penyajian data

Data yang didapat untuk digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi untuk memberi penjelasan tentang data yang diperoleh. Pada tahap ini peneliti melakukan pengorganisasian data dalam bentuk penyajian teks naratif. Selanjutnya teks naratif tersebut diringkas dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan interpretasi atau pemahaman makna tindakan subjek penelitian

tentang kinerja pengawas PAI pada SMP Negeri di Kecamatan Kertapati dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3. Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verifying*)

Langkah kegiatan dalam analisis data adalah memverifikasi, yaitu pengujian data yang diperoleh sebelum menarik suatu kesimpulan. Sebelum kesimpulan akhir yang kredibel, peneliti akan membuat kesimpulan awal atau sementara, kemudian akan dilakukan pengujian terhadap data-data atau bukti yang kuat.

#### *Keabsahan data*

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data, diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

#### **Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disajikan dalam lima bab, termasuk pendahuluan, yang ditampilkan dalam bab pertama meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metodologi penelitian, objek data, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori, membahas tentang kinerja pengawas pendidikan agama Islam, tujuan dan fungsi pengawas, rekrutmen pengawas pendidikan agama Islam serta kegiatan pengawas pendidikan agama Islam.

Bab ketiga, menampilkan profil pengawas pendidikan agama Islam, beban kerja pengawas pendidikan agama Islam, kelompok kerja pengawas pendidikan agama Islam, keadaan guru pendidikan agama Islam pada SMP N 12, SMP N 25 dan SMP N 36 dan sekretariat pengawas pendidikan agama Islam.

Bab keempat, hasil penelitian dari pembahasan. Pada bab ini disajikan tentang data kinerja pengawas pendidikan agama Islam meliputi : kinerja pengawas pendidikan agama Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawas pendidikan agama Islam serta analisa dan pembahasannya.

Sebagai penutup dari tesis ini, maka pada bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dari apa yang telah disajikan sebelumnya, implikasi hasil penelitian serta saran-saran yang dianggap perlu